

**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar 2013, 2014, 2015)**



**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam  
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**ANRIAS**

**NIM:10300111016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anrias  
NIM : 10300111016  
Tempat/tgl. Lahir : Panggentungan 04-06-1993  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Datuk Ripanggentungan Utara  
Judul : Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember, 2015

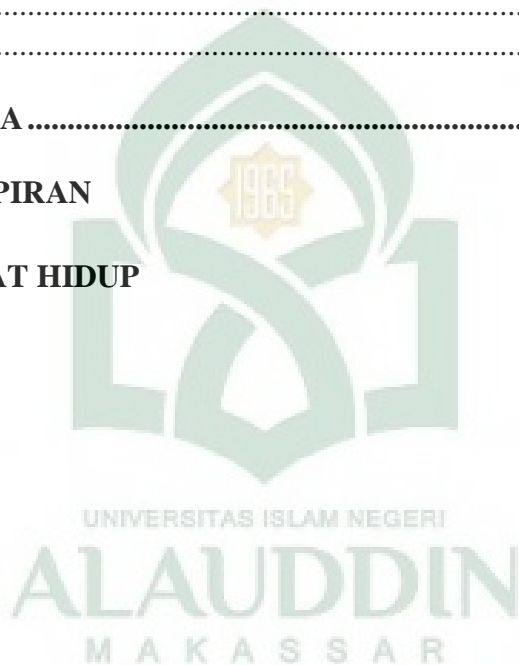
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
Anrias  
NIM: 10300111016

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Anak di Bawah Umur menurut Psikologi Perkembangan .....	15
B. Tujuan Umum Narkotika .....	20
C. Pandangan dan Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Narkotika .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	45
G. Pengujian Keabsahan Data.....	45

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Kota Makasar.....	48
B. Deskripsi Pelaku Tindak Pidanan Narkotika Anak di bawah Umur .....	58
C. Dampak yang ditimbulkan Penyalahgunaan Narkotika dibawah Umur ..	61
D. Penangana Pelaku Narkotika Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Implementasinya.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## KATA PENGANTAR



Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dapat dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.

Sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan Allah swt. yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. maka tepatlah bila menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sederatan hamba Allah swt. yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan, kiranya dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Syamsuddin dan Ibunda Hj. Santi, semoga Allah swt. melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penyusun semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan dari keduanya, penyusun selalu memperoleh kekuatan materil dan moril dalam mendapati pencarian hakikat diri.
2. Bapak Prof. Dr Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan seluruh wakil Rektor
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh wakil dekan.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Kurniati, M.HI selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
5. Ibu Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Ag dan Irfan, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keiklasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusun skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.

7. Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak AKP Ilham Fitriyadi SE. SH. MM, kepala KANIT IDIK III Polrestabes Makassar yang telah memberikan kemudahan kepada penulis saat melakukan penelitian di instansi tersebut.
9. Saudara-saudara seperjuangan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) angkatan 2011 terima kasih atas kebersamaanya kurang lebih 4 tahun.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin

*Wassalamu' Alaikum Wr.Wb*



Makassar, 18 Desember, 2015

Penyusun,

Anrias

NIM: 10300111016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> tau ya	a	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan ya	i	i dan garis di atas
اُ...	<i>dammah</i> dan w au	u	u dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. Ta' marbutah

*Transliterasi* untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbana*  
نَجَّيْنَا : *najjaina*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
الْحَجَّ : *al-hajj*  
نُعِمْ : *nu“ima*  
عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ *dinullah* بِإِذْنِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadunillarasul*

*Innaawwalabaitinwudi 'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan*

*Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

UIN = Universitas Islam Negeri

HPK = Hukum Pidana Ketatanegaraan

UU = Undang-Undang

RUU = Rancangan Undang-undang

POLRESTABES = Kepolisian Resor Kota Besar

UUPA = Undang-undang Perlindungan Anak

KANIT = Kepala Unit

RI = Republik Indonesia

HAM = Hak Asasi Manusia

swt. = Subhanau wa ta'ala

saw. = Sallallahu 'alaihi wa sallam

QS.../..... = QS, al-Maidah/5:90-91, QS, al-Nisa/4:43, QS, al-Baqarah/2:219,

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
د	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
د	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\ الى اخره
ج	=	جزء



## **ABSTRAK**

Nama : Anrias  
Nim : 10300111016  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Judul : Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur (studi kasus di Polrestabes Makassar)

---

Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1). Bagaimana Deskripsi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak dibawah Umur ?, 2). Bagaimana Dampak yang ditimbulkan Penyalahgunaan Narkotika Anak dibawah Umur ?, 3). Bagaimana Penanganan Pelaku Narkotika Anak dibawah Umur menurut Hukum Islam ?

Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Polrestabes Makassar untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung Kepala kepala KANIT IDIK III Polrestabes Makassar.

Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa, Polrestabes telah menangani kasus tindak pidana narkotika mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tahun 2013 berjumlah 255 dengan anak di bawah umur sebanyak 41 orang, tahun 2014 sebanyak 323 dengan anak di bawah umur sebanyak 66 orang dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 341 orang. Sedangkan dampak yang ditimbulkan yaitu Dampak mengkonsumsi narkoba menimbulkan gejala seperti gejala euphoria, delirium, halusinasi, weakness, drowsiness, dan coma. adapun dampak fisik penyalahgunaan narkotika gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan paru-paru. dampak fisik dan dampak social. Adapun pandangan hukum Islam tentang pelaku Narkotika anak dibawah umur yaitu dikategorikan termasuk jarimah Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan. Dalam hukum Islam, kata hudud dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah Nabi saw, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan qodhi atau penguasa yang disebut ta'zir.

Berdasarkan hasil Penelitian diatas dimana pada tiap tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika dibawah umur semakin meningkat. Akibat meningkatnya perilaku tersebut maka ini akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan anak dibawah umur yang ada di kota Makassar. Dan Polrestabes Makassar telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan menangkap para pelaku Narkotika.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan

masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>1</sup>

Tentu bukan hal yang asing di telinga kita. Setiap hari kita mendengar berita tentang bandar narkoba yang ditangkap polisi karena memang narkoba dilarang di Indonesia. Selain itu sudah banyak pakar kesehatan yang mengungkapkan efek berbahaya dari narkoba. Narkoba itu sendiri adalah singkatan dari Narkotika Penyalahgunaan. Narkoba oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali kali mencoba dan mengonsumsi narkoba. Fakta yang disanksikan hampir disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, Makassar.Tribunnews.com ternyata peredaran narkoba telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang.

Masalah penyalahgunaan telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tak pernah henti-hentinya di bicarakan karna masalah

---

<sup>1</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, (bandung: Gramedia Edisi Februari 2002), Jakarta, h.4.

narkotika terjadi dimana-mana. Penyalahgunaan narkotika yang meneimbulakan kerusakan fisik baik mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat yang mencengangkan narkotika dapat mengancam masa depan anak. Hal ini di sebabkan karna anak berada di masa pubertas yakni masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa. Anak belum sanggup berperang sebagai orang dewasa dan sulit membangun rasa percaya dirinya. Perasaan kurang di hargai itu muncul bentuk dalam bentuk-bentuk kelainan tingkah laku anak. Dalam kondisi seperti itu, anak sering kali melanggar hukum seperti melakukan penyalahgunaan narkotika. Pembentukan identitas diri pada tahap anak tidak akan membuat asing dirinya sendiri. Kendati ia berubah sesuai hasil kompromi antara dirinya dan masyarakat, penilaian remaja terhadap dirinya sendiri dengan penilaian dengan orang lain terhadap anak, itulah yang menghasilkan identitas yang baru dan seimbang. Penilaian tentang maupun atau tidaknya anak dalam membentuk identitas diri yang matang tersebut baru dapat ditarik setelah anak berinteraksi dengan masyarakat guna mendapatkan umpan balik (feedback).<sup>2</sup> Dari urain tersebut, dapat di pahami bahwa pergaulan sosial (integritas sosial) merupakan kunci pendukung bagi anak untuk mencapai kematangan sosial dan emosional. Di sebabkan oleh dua faktor: pertama, masa kanak-kanak yang tidak memberikan basis memadai bagi proses identifikasi diri. Kedua, lingkungan sosisal yang tidak mendukung. Kebanyakan anak yang menggunakan narkotika dengan alasan sekedar mencoba, alhasil merebak keyakinan seolah-olah siapa pun pada dasarnya dapat mengetahui perilakunya untuk menggunakan narkotika

---

<sup>2</sup>Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 19.

‘sebatas’ untuk kesenangan sesaat. Pengguna narkoba yang berkepanjangan dapat dipastikan akan mendapatkan resiko negatif masalah-masalah umum yang sering di hadapi oleh pemuda pengguna narkoba adalah kehidupan keluarga yang berantakan, prestasi belajar yang buruk, perilaku seksual yang tidak aman dan illegal, kecelakaan lalu lintas, perilaku kekerasan, problem dengan perilaku otoritas serta meninggalkan resiko terjadinya semacam HIV/AIDS.<sup>3</sup>

Kegagalan anak dalam mengembangkan identitas dapat bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkoba untuk pengedar dan pemakai kalangan anak-anak usia muda. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang di jatuhkan kepada anak-anak adalah 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut.

Badan peradilan merupakan salah satu yang memegang peranan penting dalam Negara hukum yang menganut pembagian/pemisahan kekuasaan. Pada kekuasaan inilah yang akan menentukan hukumnya. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan menghambil tindakan ketika terjadi ketidak tertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim

---

<sup>3</sup>Reza Indragiri Amriel, *Panduan Menghindari Jerat Narkoba* (Cet. 1; Jakarta Buku Kompas,2006), h. 32.

berhak dan harus menghimpung keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya.<sup>4</sup> Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawab sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan keputusan, melainkan juga keseluruhan perbuatan senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawab.

Hakim dalam melakukan pemidanaan atau penjatuhan keputusan bagi pengguna narkoba didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkoba yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar. Karena pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu kebanyakan dikenakan pidana penjara, seharusnya mereka tidak di penjara melainkan di rehabilitasi. Penyalagunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terutama terhadap anak-anak. Untuk melihat bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan, berikut ini disajikan data tentang putusan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyajian data tentang putusan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimaksud untuk

---

<sup>4</sup> <http://komunitasindependen.blogspot.com/2011/07/potret-lembagapengadilan.html.com>, diakses, Kamis 12 Februari 2015

memberi penjelasan tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba.

Penerapan hukumana pada kasus penyalahgunaan narkoba terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi berupa rehabilitasi bagi penyalagunaan narkoba, dan putusan yang di jatuhkan kepada penyalagunaan narkoba terkesan masih jauh dari yang di harapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Undang-undang nomor 3 (tiga) tahun 1997 tentang peradilan anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menagakomidasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan undang-undang tersebut dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, pernakan hakim begitu dominan.

“Satjipto raharjo dalam sebuah diskusi menegemukakan bahwa, hakim tidak boleh hanya berlindung di belakang undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani. Hukum, undang-undang hanya kertas dengan tulisan umum dan abstrak. Di tangan para hakim, ia menjadi keadilan yang hidup.”<sup>5</sup>

Dunia internasional telah memiliki konvensi Hak Anak (KHA) yang di sahkan majelis umum perserikatan bangsa-bangsa tanggal 20 november 1989, guna melindungi anak. Indonesia telah merativikasi konvensi Hak Anak melalui

---

<sup>5</sup>Suwono, himpunan karya tentang *hukum pidana*, (Yogyakarta ; Liberty, 1982), h. 28.

keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, tanggal 25 novembver 1990. Dengan meratifikasi, Indonesia terikan konvensi Hak Anak berikut konsekuensinya.

Pasal 3 ayat (1) konvensi Hak Anak menyebutkan

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah atau swasta, pengadilan para penguasa pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama.”<sup>6</sup>

Teori pertanggung jawaban pidana<sup>1</sup> menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindakan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa batas umur anak-anak yang dijatuhkan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operasi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional. Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalagunaan narkoba, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya dikalangan pelajar dan remaja.<sup>7</sup>

Narkoba digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 tentang *Tentang Hak Anak* (PT. Angkasa Raya:, Yogyakarta, 2006), h. 65.

<sup>7</sup>Sudarto, Kapita Selekt (Hukum Pidana., 1986), h. 49.

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

Pada dasarnya narkoba akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima hal yang harus dijaga dalam Islam, yakni Agama, Jiwa, Akal, Kehormatan dan Harta. Sehingga jelas sekali bahwa menurut Al-Quran narkoba itu haram. Seperti dinyatakan dalam Q.S, al- Maidah / 5:90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.85.



## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Deskripsi fokus**

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik alami, semi sintetis atau sintetis murni yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan menimbulkan ketergantungan.

Dari latar belakang diatas pada kesempatan ini penulis akan menjelaskan satu persatu definisi dari judul draft skripsi ini. Adapun istilah yang digunakan yaitu:

1. Implementasi : penerapan atau pelaksanaan.<sup>9</sup>
2. Pemidanaan : proses, cara, perbuatan memidana<sup>10</sup>
3. Tindak Pidana : perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.<sup>11</sup>
4. Narkotika : Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana

---

<sup>9</sup> J. T. Prasetyo, S.h, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt Sinargrafika, 2009), h.124

<sup>10</sup> Drs. Rudy T. Erwin, S.H., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt Sinargrafika, 2009), h.123

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121

terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>12</sup>

5. Anak di Bawah Umur : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

## **2. Fokus penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Polrestaes Makassar. Judul skripsi ini, mengembangkan sejauh mana peranan kepolisian dalam menetapkan penetapan pidana narkotika dan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur. dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum yang ditetapkan anak di bawah umur dalam penanganan kasus pelaku pidana tindak pidana narkotika, serta menjelaskan tanggung jawab orang tua wali anak untuk memberikan arahan atas di penuhiya kebutuhan anak di bawah umur .

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas maka pokok permasalahan dari implementasi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Dari pokok masalah tersebut diperoleh sub permasalahan antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak*.

<sup>14</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h.11

1. Bagaimana deskripsi pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur ?
2. Bagaimana dampak yang di timbulkan penyalagunaan narkoba anak di bawah umur?
3. Bagaimana penanganan pelaku narkoba anak di bawah umur menurut hukum islam ?

#### ***D. Kajian Pustaka***

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu korelasi terhadap implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur. banyak literatur yang membahas tentang hal ini di antaranya:

1. Tina Asmarawati,S.H, M.H di dalam bukunya ini berdasarkan hasil studi literature dan lapangan, dalam menanggulangi kejahatan di indobesia. sistem peradilan pidana merupakan sistem untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Buku ini juga menjelaskan tentang empat lembaga hukum yang berwenang dalam sistem peradilan pidana, lembaga tersebut adalah lembaga Kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan,dan kelembaga kemasyarakatan.
2. DR. HJ. Tina Asmarawati,S.H, M.H bukunya mengenai pengaruh pada perkembangan masyarakat mempunyai pengaruh pada perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. dalam hukumnya pidana yang umunya hanya di atur dalam KUHP. Karna adanya perkembangan dalam masyarakat yang semakin maju/berkembang maka peraturan-peraturan

yang ada tidak memadai , karena perkembangan hukum ibarat deret hitung sedangkan perkembangan masyarakat ibarat deret hukum.

3. Hadi Supeno dalam bukunya ini mengawal perlindungan anak di tingkat nasional sebagai upaya untuk menghentikan kriminalisasi anak dengan cara membangun sistem peradilan anak dengan semangat melindungi bukan mengadili hal ini di dasari oleh jumlah statistik anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia sangat memprihatikan. Setiap tahun ada sekitar 7000, 6000 di antaranya masuk penjara, baik penjara anak, penjara dewasa, maupun tempat tahanan-tahanan lainnya. Banyaknya anak masuk penjara bukan karna anak Indonesia itu bersifat jahat atau kriminal tetapi karena terjadinya kriminalisasi anak secara massif.
4. dr Lydia Harlina Martono SKM dan dr Satya Joewana bukunya ini menjelaskan tentang upaya-upaya pencegahan penyalagunaan narkoba terutama generasi muda terkhususnya pada anak-anak usia SD 6-12 Tahun. Buku ini menjelaskan tentang bahaya narkoba terhadap anak-anak dan remaja, tanpa usaha mengubah perilakunya dengan memberi keterampilan yang di perlukan.<sup>15</sup> Dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana peran pendidikan merupakan upaya sadar manusia dalam seluruh aspek ke pribadiannya baik pengetahuan, emosi, kemauan, maupun keterampilan. Buku ini juga menawarkan cara bertanggung jawab menangkal narkoba. Dan kekerasan merupakan model pendidikan

---

<sup>15</sup> dr Lydia Harlina Martono Balaipustakaonline.com di akses, minggu 15 november 2015

pencegahan yang disusun dan di kembangkan dengan mengacu pada program DARE (Drug Abuse Resistance Education Program).

## ***F. Tujuan dan Kegunaan***

### **a. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. mengetahui deskripsi pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur ?
2. Mengetahui dampak yang di timbulkan penyalagunaan narkoba anak di bawah umur?
3. Mengetahui penanganan pelaku narkoba anak di bawah umur menurut hukum islam ?

### **b. Kegunaan**

#### **1. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai impementasi pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur. Dalam penelitian ini memberi manfaat agar kiranya kita sebagai anak indonesia bisa menumbuhkan kesadaran generasi mudah akan pentingnya menghindari bahaya narkoba oleh anak di bawah umur. Dengan mengetahui akan terjadinya pembedanaan terhadap anak, maka

peranan orang tua anak bisa memberi arahan terhadap anak tersebut secara signifikan.

## 2. Kegunaan praktis

1. Memberikan pemahaman kepada anak, akan pentingnya menghindari narkoba di kalangan masyarakat Indonesia agar para anak bangsa kita bisa terhindar dari bahaya narkoba yang bisa merenggut nyawa bagi para pengguna.
2. Dengan mengetahui fakta implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur maka akan menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai penelitian tersebut.
3. Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar maupun pelajar mengenai implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **Tinjauan Umum Anak Dibawah Umur Menurut Psikologi Perkembangan**

##### **1. Defenisi Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, berbicara mengenai anak yang melakukan tindak pidana atau behadapan dengan hukum maka pembatasan umum didasarkan pada undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yaitu pada pasal 1 angka (1) dimana disebutkan bahwa:<sup>1</sup>

Anak adalah orang perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun da belum pernah kawin.

Selanjutnya menurut pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dinyatakan bahwa:

Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan dinyatakan terlarang

Selanjutnya menurut pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dinyatan bahwa

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang *peraturan Pemerintah* (Cet 1; Jakarta Asa Mandiri2008), h. 63.

Anak nakal adalah

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perbuatan perundang-undangan maupun peraturan hukum hal yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan *judicial review* terhadap pasal 1 angka (1) undang-undang peradilan dimana Mahkamah Konstitusi merubah bunyi pasal tersebut menjadi:

Anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>2</sup>

## 2. Kategori Umur

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pada batas umur sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke pengadilan setelah anak bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum pernah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke pengadilan anak.

---

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 1997 tentang *Pengadilan Anak*



Sedangkan menurut hukum pidana islam batasan umur yang termasuk kedalam anak terdiri dari tiga fase, yaitu fase tidak adanya kemampuan berfikir (*indrak*) sesuai dengan kesempatan fuqaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak di anggap tidak mempunyai kekuatan berfikir.<sup>3</sup>

### 3. Pola Penyimpangan

Menurut Karton penyimpangan perilaku anak dapat juga disebut dengan kenakala anak adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan dalam usia anak atau transisi masa anak –anak dan ke remaja . kenakalan anak dalam studi masalah sosisal dapat di kategorikan kedalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dan berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sisoal yang berlaku menyimpang dapat di definisikan sebagai suatu perilaku yang di depresikan oleh seorang atau lebih dari anggota masyarakat, baik disadari ataupun tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku atau yang telah diterima oleh sebagai masyarakat.<sup>4</sup>

Adapun perilaku-perilaku menyimpang di kalangana anak menurut kartono

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, pidana dan pembedanaan. (Jakarta: sianar Grafika 2008). h. 101.

<sup>4</sup> Baiq Fathiyatin, (psikologi perkembangan anak dan remaja 2008), h. 15.

1) Kenakalan terisolir (*delinkuensi terisolir*)

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari anak, pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis

2) Kenakalan Neurotik (*delenkuensi neurotik*)

Pada umumnya, anak nakal pada tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, masa lalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain-lai sebagainya.

3) Kenakalan Psikopatik (*Delinkuensi psikopatik*)

Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling bahaya.

4) Kenakalan defek moral (*delinkuensi defek moral*)

Defek (*defec defectus*) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cederah, cacat, kurang. Mereka-mereka cepat puas dengan presetasinya, namun perbuatan mereka disertai agresivitas yang meledak. Anak yang defek moralnya biasa menjadi penjahat yang sukar di perbaiki.

Perilaku menyimpang menurut Narwako

1. Tindakan *noncorfon* yaitu Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada
2. Tindakan anti sosial atau asosial Yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umu.

3. Tindakan-tindakan kriminal yaitu Tindakan nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan tertulis dan mengancam jiwa dan keselamatan orang lain.

4. Pola Pengaruh Anak, Selain dalam pengaruh keluarga, salah satu factor yang menghambat pembentuka kepribadian anak adalah pengaruh dari lingkungan keluarga. Adapun pengaruh dari luar lingkungan keluarga yaitu di luar lingkungan bermain anak dimana anak harus menyelesaikan dirinya dengan teman-temannya.

#### 4. Macam-Macam Pola Asuh:

Bentuk pola asuh orang tua terhadap anak pada dasarnya dapat membentuk anak dalam mengembangkan control diri dari bimbingan diri sehingga anak dapat memberikan keputusan yang tepat dalam berperilaku.

Berdasarkan model dan teori pada asuh orang tua terhadap anak setidaknya ada tiga macam bentuk:

1. Orang tua dalam bertindak pada anaknya tegas
2. Suka menghukum
3. Kurang memberikan kasih sayang
4. Kurang simpatik<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Thomas Gordon, *Menjadi Orangtua Efektif*, (Jakarta : Gramedia, 1994), h. 127.

## B. Tujuan Umum Narkotika

### 1. Pengerian Narkotika

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).”<sup>6</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Menurut Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>6</sup>Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh.Zakky A.S *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 17-18.

Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

## 2. Macam-Macam Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada farmasi, melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh–pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu:

- 1) Mempengaruhi kesadaran.
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruh–pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang(bukan rangsangan sex), dan menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.<sup>7</sup>

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat–obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat–zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang–Undang Narkotika RI No. 35 Tahun 2009.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat–obat semacam narkotika berkembang pula secara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat–zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan pemakai bergantung hidupnya terus–

---

<sup>7</sup>Redaksi Badan Penerbit Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 1

menerus pada obat–obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang panjang pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan. Dalam Undang–Undang obat bius tersebut, yang di kategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat–zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat–zat tersebut berpengaruh karena bergerak hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Dalam Undang–Undang narkotika, dibagi dalam 3 golongan menurut potensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Contohnya candu (*opium*), heroin (*putauw*), dan ganja. Heroin diolah secara kimia dari tanaman candu dan disebut bahan *semisintesis*.

#### 1. Candu(*opium*)

Candu atau Opium terdiri atas 2 jenis yaitu :

- a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- b. Opium masak terdiri dari candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan

lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Sedangkan Jicing, yaitu sisa-sisa dari candu yang diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

## 2. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphin*, dan *opium*. Heroin juga disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

## 3. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.<sup>8</sup>

Narkotika Golongan II berpotensi menimbulkan ketergantungan dan dapat digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contohnya *morfin*, *petidin*, dan *metadon*.

Salah satu Narkotika golongan II yaitu *morfin*. Morfin adalah Zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh ransangan yang diinginkan selalu

---

<sup>8</sup>Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika 2008*, h. 20-25

memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan morfin dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* by John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morfin berguna untuk hal berikut :

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- 2) Menolak penyakit mejan (diare).
- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codein*.
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- 5) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
- 6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Sedangkan Narkotika Golongan III berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara luas dalam pengobatan. Contohnya *kodein* (obat batuk) dan *buprenorfin*.<sup>9</sup>

### 3. Undang Undang Tentang Narkotika

Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 111 Menyatakan Bahwa:

---

<sup>9</sup>Redaksi Badan Penerbit Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika* 2007, h. 33.



- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal 112 Menyatakan Bahwa:**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Pasal 113 Menyatakan Bahwa:**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Menyatakan Bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 Menyatakan Bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 Menyatakan Bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 117 Menyatakan Bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 118 Menyatakan Bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 119 Menyatakan Bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 122 Menyatakan Bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 Menyatakan Bahwa:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Pasal 55 Ayat (2), dan Pasal 103 Ayat (3).
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**Pasal 131 Menyatakan Bahwa:**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 132 Menyatakan Bahwa:**

- 1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.



- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>10</sup>
- 3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

### **C. Pandangan dan Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika tidak dikenal pada zaman Rasulullah Saw walaupun demikian narkotika termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamar. Istilah narkotika dalam Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena teori ilmu ushul fiqhi, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Untuk itu apabila memang belum diketemukan status hukum dari narkotika dalam syariat Islam, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan jalan ijtihad, melalui metode hukum Islam dengan jalan pendekatan qiyas sebagai solusi istimbat hukum yang belum jelas

---

<sup>10</sup> [http://www.bnn.go.id/portal/\\_uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf)

hukumnya dalam syariat Islam. Berikut ini metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan *qiyas*

- a. *Al- Ashl*, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-qur'an), sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 90.
- b. *Al-Far'u* (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamr. Narkoba dalam hal ini disebut al-musayyabah (yang diserupakan).
- c. Hukum ashl adalah khamr hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (QS.Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al far'u)
- d. *Al-Illat*, karena dampak negatif yang ditimbulkan khamr yang dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan Allah SWT. Sedangkan narkoba adalah far'u karena tidak terdapat karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai khamr dalam Kedudukannya adalah memabukkan.<sup>11</sup>

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.<sup>12</sup> Minuman khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan khamr atau

---

<sup>11</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah kaidah Hukum Islam (ushul fiqhi)*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers,1989) Hal. 90.

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 78.

bukan, baik dari anggur atau lainnya baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.<sup>13</sup>

Dengan demikian, kata khamr itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat mebuat seseorang mabuk setelah meminumnya, kata khamr bisa meliputi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.<sup>14</sup>

Secara garis besar khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alakohol dengan menggunakan kata lisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.<sup>15</sup>

Pada zaman klasik, cara mengomsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Sedangkan pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk sesuai kepentingan dan kondisi pemakai.<sup>16</sup>

Islam melarang Khamr, karena dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khbaitis*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Sejak semula islam telah menjelaskan kepada ummat manusia bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Dalam pandangan islam keharaman tersebut terletak pada tindakan mengomsumsi sesuatu yang

---

<sup>13</sup>M.Ichsan & M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008), h. 143.

<sup>14</sup>A.Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, (Cet. I; Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996), h. 84.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*, (Cet. I; Bandung: Al-Ma'rif,1984), h.46.

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (bandung: Gramedia 2008), h. 78.

dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apa-apa, karena pandangan islam dalam hal ini bersifat preventive dan antisifatif.<sup>17</sup> Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara, dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang merusaknya adalah dilarang

Larangan meminum khamr tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Nash yang pertama turun terdapat dalam surah Al-Nisa ayat 43 mengenai pengharaman khamr, hal ini disebabkan kebiasaan mengomsumsi minuman keras pada dikalangan bangsa arab yang merajalela.

Allah berfirman dalam QS Al-Nisa /4: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ تَحْتَىٰ تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”<sup>18</sup>*

Dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin melaksanakan shalat dalam Keadaan mabuk, karena shalat adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan seperti kaum muslimin yang diwajibkan untuk tidak mengomsumsi

---

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.71.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.85.

minuman keras dengan kuantitas seperti biasa agar dapat melaksanakan shalat lima waktu dalam keadaan mabuk.<sup>19</sup>

Larangan ini mungkin yang mendorong kaum muslimin waktu itu untuk bertanya tentang hukum minuman keras itu sendiri, setelah itu diturunkan nash yang kedua menjawab segala pertanyaan yang menggajjal di hati mereka dan menerangkan illat (sebab) pelarangan tersebut.

Allah berfirman dalam QS Al-baqarah /2: 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

Terjemhanya:

*"mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".<sup>20</sup> Maksudnya mereka bertanya kepada rasul tentang hukum khamr dan*

Judi, dimana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal Islam. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan manfaat dan kemudaratanya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamanya dan wajib menjauhi kedua perbuatan tersebut secara total. Allah menggambarkan bahwa dosa dan mudarat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilang ingatan, harta dan menghalangi berdzikir kepada Allah, kemudian (menimbulkan) saling membenci, dosa lebih besar didapatkan dari harta

<sup>19</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wadhi* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III), terj. Ali Yafie, (Cet. I; Bogor, Kharisma Ilmu, 2008), h. 54.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

dengan menjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara berjudi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.<sup>21</sup>

Penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka sudah terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada keharaman secara mutlak.

Allah berfirman dalam QS al-Maidah/ 5: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ  
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

*“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”<sup>22</sup>*

<sup>21</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wadhi* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III), h. 54-55

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (khamr) ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain.<sup>23</sup>

Adapun pelarangan meminum minuman keras bersumber dari Al-qur'an menurut pendapat yang kuat, penentuan delapan puluh kali dera baru ditetapkan pada masa Khalifa Umar bin al-Khattab ra ketika bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman meminum khamr. Ali bin Abu Thalib ra menyarankan agar hukuman berupa delapan puluh kali dera dengan alasan apabila seseorang meminum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan memfitnah (*qadzaf*) sedangkan hukuman bagi pelaku qadzaf adalah delapan puluh kali dera. Pendapat ini disetujui para sahabat yang lain. Jadi, sumber minuman keras adalah Al-Qura'an, hukumannya bersumber dari hadist dan berasal dari ijma para sahabat. Hukum Islam menetapkan hukuman dera bagi peminum minuman keras atas dasar yang kuat yakni ilmu psikologi. Hukum islam kemudian memerangi faktor-faktor psikologis yang mendorong dilakukannya tindak pidana meminum minuman keras dengan faktor psikologis yang berlawanan yakni yang ada tabiatnya dapat dilakukannya tindak pidana tersebut dimana tidak ada faktor lain dapat mengganti posisinya. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah saw adalah hujja yang tidak boleh ditinggalkan karena perbuatan yang lain. Ijma dibatalkan jika

---

<sup>23</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wadhi (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III)*, h. 54

ijma itu berlawanan dengan apa yang dilakukan Rasulullah saw, Abu Bakar ra, Ali ra. Apa yang dilakukan Umar bin al-Khattab ra adalah hukuman ta'zir yang boleh dilakukan jika seorang penguasa memiliki kebijakan untuk melakukannya.<sup>24</sup> MUI sebagai lembaga Islam di Indonesia berpendapat bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa dan negara, merupakan kejahatan luar biasa juga sebagai pengimbang dalam memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi dengan tindakan hukum yang normal.

Sementara itu pemidanaan dalam Islam sendiri telah dikemukakan oleh Sabri Samin bahwa hukum pidana dalam Islam merupakan sanksi yaitu hukuman atau imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.<sup>25</sup> Sementara itu, tujuan dari pemberian hukum pidana dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan berupa kedamaian, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>26</sup> Selain itu, menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pemberian sanksi pidana bagi yang melakukan kejahatan bahwa penegakan sanksi pidana adalah ibadah seperti jihad di jalan Allah Swt. Adapun perbuatan-perbuatan pidana yang dapat diberikan sanksi pidana menurut Sabri ada 3 macam, yaitu *Hudud*, *Qisas/Diyat*, dan *Takzir*.<sup>27</sup> Tindak Pidana *Hudud* adalah tindak pidana yang menurut para fuqaha telah

---

<sup>24</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wadhi* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III), h. 69.

<sup>25</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia (Eklektisisme dan Pandangan non-Muslim)*, (Ciputat: Kholam Publishing), 2008, h. 45.

<sup>26</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, h. 93.

<sup>27</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, h. 101.



ditetapkan sanksi pidananya dalam nash-nash Islam dan menjadi hak Allah Swt., contoh dari perbuatan ini adalah *Zina*, *Al-Qadzaf*, *Al-Sariqah*, dan lain-lain. Sementara itu tindak pidana *Qiyas/Diyat* merupakan tindak pidana yang menurut fuqaha telah ditetapkan Allah Swt. sanksi pidananya dalam nash akan tetapi terdapat hak manusia di dalamnya contoh dari jenis-jenis ini adalah pada sanksi pidana terhadap berbagai jenis pembunuhan.<sup>28</sup> Tindak pidana *Takzir* adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *Hudud* dan *Qisas/Diyat* penetapan hukumannya adalah diserahkan pada penguasa negara. Menarik untuk diperhatikan dalam pandangan tersebut bahwa tindak pidana *Takzir* merupakan keseluruhan tindak pidana yang terdapat dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tidak ditetapkan sanksi pidananya, artinya secara total semua perbuatan yang telah diharamkan Allah untuk dilakukan. Berekaitan dengan ini, khamr merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Swt dan dengan menggunakan metode *Qiyas* maka hukuman atas khamr disamakan dengan narkoba artinya secara pidana Islam khamr merupakan perbuatan pidana yang hukumannya disesuaikan dengan hukuman penggunaan khamr.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, h. 103.

<sup>29</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, h.104.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mengelola dan menafsirkan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran dan kesimpulan dari keseluruhan penulis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, subjek objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>1</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* (hukum positif), Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*. Penelitian ini menekankan pada segi-segi *yuridis*, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

#### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder :

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan, dengan cara intrview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab pada

---

<sup>1</sup> Muh Khalifah Mustamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*( Makassar: Alauddin Pres, 2009), h. 19.

informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang jelas. Dan sumber data tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.

- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library reseacrh*, dengan jelas menelaah peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu :

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang membicarakan jawaban atas pertanyaan itu<sup>2</sup>. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis

---

<sup>2</sup> Lexy J. meleong, *Metodologi penelitian kualitatif* ( Bandung : PT Remeja Rosdakarya, 2011 ), h. 189.

kepada informannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur.

- b. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang desengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasi.<sup>3</sup>
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau data-data yang bersangkutan.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun alat-alat instrumen disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
- b. Buku catatan dan alat tulis, alat ini berfungsi untuk mencatat semua percakapan dari sumber data.
- c. Camera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informannya.

---

<sup>3</sup> S.Nasution, *Metode Research* ( jakarta: PT.Bumi Aksara,2006), h. 106.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

- 1) *Klasifikasi* data adalah menggolongkan atau mengkatagorikan data yang dihasilkan oleh penelitian.
- 2) *Reduksi* data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 3) *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- 4) *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data didekripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

### b. Analisis data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakuka dengan jalan mengumpulkan memilah, mengklasifikasi, dan

mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

### **G. Pengujian dan Keabsahan Data**

Dalam hal ini penulis memakai beberapa teknik dalam pengujian dan keabsahan data, yaitu antara lain :

#### **a. Perpanjangan Keikutsetraan**

Penulis akan membutuhkan waktu yang panjang dalam hal ini peneliti tinggal dilapangan untuk meneliti sampai pengumpulan data tercapai.

#### **b. Trigulasi**

Trigulasi adalah tekni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

#### **c. Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi**

Teknik dilakukan yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi dan hasil diskusi tersebut bisa dijadikan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **d. *Auditing***

Peneliti akan menyediakan segala macam pencatatan yang diperlukan dan bahan-bahan peneliti yang tersedia dan merangkum semua data yang telah dilakukan melalui pengamatan, wawancara, rekaman, dll.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pembahasan Lokasi Penelitian

##### 1. *Gambaran umum kota Makassar.*

Kota Makassar adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi selatan. Kota Makassar secara geografis terletak antara 119 derajat bujur timur dan 5'8 derajat lintang selatan. Wilayah kota Makassar berbatasan dengan selat Makassar di sebelah barat, kabupaten kepulauan pangkajene di sebelah utara, kabupaten maros di sebelah timur dan kabupaten maros di sebelah timur dan kabupaten gowa di sebelah selatan. Luas wilayah kota Makassar 175,77 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi empat belas kecamatan. Kota ini termasuk kota kosmopolis, banyak suku bangsa tinggal di sini. Di kota ada suku Makassar, suku Bugis, Toraja, dan Mandar. Di kota ini ada pula komunitas Tionghoa yang cukup besar. Makanan khas Makassar yang cukup terkenal adalah soto Makassar, roti maros, kue tori' dll. Dewasa ini perdagangan kota Makassar tergolong maju. Pusat-pusat perniagaan dan pasar-pasar tradisional, pasar grosir sampai mal-mal modern berkembang pesat.<sup>1</sup>

Kota metropolitan Makassar adalah ibukota dari provinsi Sulawesi selatan, terletak antara 119'241'17'38" Bujur timur dan 5'8'6'19" Lintang

---

<sup>1</sup> Sulawesi Selatan Dalam Angka 2007 (01-7-2007) BPS Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Penancangan No. 4, Serang 42124 [http://aa-makassar.blogspot.com/2009/12/profil-kota-makassar\\_7742.html](http://aa-makassar.blogspot.com/2009/12/profil-kota-makassar_7742.html)(5 November 2015)



selatan yang berbatasan dengan kabupaten maros selatan utara, kabupaten maros sebelah timur, kabupaten gowa sebelah selatan, selat Makassar di sebelah barat sebelumnya berubah nama menjadi kotamadya Ujung Pandang. Yang bias di sebut kota “Anging Mammiri” yang berarti “kota hembusan anging sepoi sepoi basah” dan juga terkenal dengan “Pantai Losari”nya yang indah, tempat menikmati hembusan angin laut yang menyegarkan dan menyaksikan terbenangnya matahari serta keindahan panorama laut kota yang bersuhu sekitar 22 – 33 ° C ini, memiliki area seluas 175,77Km<sup>2</sup>. Luas laut di hitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 km<sup>2</sup>, dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0’ sampai 9’. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai yaitu sungai Tallo dan sungai Jeneberang.

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2’ (datar) dan kemiringan lahan 3-15’ (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara umum topografi kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- Bagian barat ke arah utara relative rendah dekat dengan pesisir pantai.

---

<sup>2</sup> Nurdin Hemmu, *Makassar Dalam Angka 2012*  
<http://makassartabagus.blogspot.com/2013/11/profil-kota.html> (5 November 2015)

- Bagian timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di kelurahan Antang kecamatan Panakkukang.

Perkembangan fisik kota Makassar cenderung mengarah ke bagian timur kota Makassar cenderung mengarah ke bagian timur kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di kecamatan Biringkaraya, Tamalanrea, Mangala, Panakkuakng, dan Rappocini.<sup>3</sup>

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga daerah timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota pusat kegiatan industry Makassar.

Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya belum banyak di manfaatkan, sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan terhadap sungai-sungai ini dimulai dari rencana bagaimana menjadikannya sebagai jalur alternative baru bagi transportasi kota.

Hanya saja, sejalan dengan perkembangannya saat ini dinamika perkembangan wilayah dengan konsentrasi pembangunan seakan terus berlomba di atas lahan kota yang sudah semakin sempit dan terbatas. Sebagai imbasnya tidak sedikit lahan yang terpakai saat ini menjadi lain dalam peruntukannya, hanya karena lahan yang dibutuhkan selain sudah terbatas, juga karena secara rata-rata konsentrasi kegiatan pembangunan cenderung hanya pada satu ruang tertentu saja.

---

<sup>3</sup> Pokja AMPL, *Buku Putih Sanitasi Kota Makassar-2011 Pdf*, h. 1(5 November 2015)

Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang sehingga tropis. Sepanjang 5 tahun terakhir suhu udara rata-rata kota Makassar berkisar antara 25' C sampai 33' C. curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret dengan rata-rata curah hujan 227 mm dan jumlah hari hujan berkisar 144 hari per tahun. Untuk daerah-daerah yang mendekati pegunungan, yaitu daerah sebelah timur, hujan basah cenderung sampai pada bulan Mei, sedangkan pada daerah pantai, umumnya sampai bulan April.

Berdasarkan data tahun 2010 (BPS Kota Makassar, 2011) wilayah administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 kelurahan, dengan 971 RW, dan 4789 Rt, dengan total luas wilayah administrasi kota Makassar adalah 175,77 km<sup>2</sup>. Presentase luas wilayah kecamatan yang tergolong cukup luas adalah kecamatan Biringkanaya (27,43%), Tamalanrea (18,11%), Mangala (13,73%), dan Tamalate (11,50%) dari luas total wilayah Kota Makassar.<sup>4</sup>

## **2. Kedudukan kecamatan**

Kecamatan dalam struktur birokrasi pemerintah daerah merupakan institusi terdepan dalam berhubungan dengan masyarakat organisasi kecamatan merupakan *front office* pemerintah dengan masyarakat dapat pula disebut sebagai organisasi jalanan (*stree level buareucracy*). Organisasi ini sangat menentukan citra baik dan buruknya layanan dan pengayoman serta perlindungan pemerintah atas masyarakatnya, citra pemerintah sangat

---

<sup>4</sup> Pokja AMPL, *Buku Putih Sanitasi Kota Makassar-2011 Pdf*, h. 3(9 November 2015)

tergantung dari kinerja kecamatan dan kelurahan khususnya. Salah satu factor yang menentukan kinerja organisasi pemerintah kecamatan adalah adanya kewenangan yang jelas yang harus dikerjakan oleh kecamatan.<sup>5</sup>

Keberadaan kecamatan dalam suatu daerah akan memberikan dampak positif terhadap daerah tersebut, kedudukan kecamatan merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang membantu menjalankan dan mengatur daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Kedudukan kecamatan dalam pemerintah daerah sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, pasal 47 menyebutkan bahwa :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Anwar Sanus, *Kajian Penataan Kewenangan Kecamatan Kabupaten Wajo*, (Makassar: Ianmakassar, Tahun 2005). <http://www.Ianmakassar.com/simpenelitian/detail-2/1/53/kajian-penataan-kewenangan-kecamatan-kabupaten> (13 November 2015)

<sup>6</sup> Herry Iskandar, *PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar*, (Makassar, 2009), h. 43

### 3. *Tugas pokok kecamatan.*

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan pimpinan oleh Camat.<sup>7</sup>

Tugas kecamatan dalam suatu daerah sangat penting, mengingat peran Kecamatan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di Pedesaan/Kelurahan. Salah satu perangkat daerah yang mudah di jangkau oleh masyarakat setempat, hal ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten/ Kota.

Tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 48 menyebutkan bahwa :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Camat dalam melaksanakan tugas pokok ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

---

<sup>7</sup>Tuesday, *Pemerintah Kecamatan*, (Makassar: Tugino thok No comments, Thaun 2012)  
<http://mastugino.blogspot.com/2012/09/pemerintah-kecamatan.html>.(13 November 2015)

- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
- g. Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.
- i. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- j. Pelaksaan kesekretariatan.

#### ***4. Susunan organisasi kecamatan***

- a. Camat.
- b. Sekretariat.
  - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian.
  - 2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.
- c. Seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- d. Seksi pemberdayaan masyarakat.
- e. Seksi perekonomian dan pembangunan.

f. Seksi kesejahteraan sosial.

g. Seksi pengolahan kebersihan.<sup>8</sup>

### **5. Kedudukan kepolisian**

Kepolisian merupakan salah satu pejabat Negara yang berada di daerah Kabupaten/Kota/kecamatan yang berperan penting dalam membantu pencapaian harapan suatu wilayah kecamatan untuk memberikan pengayoman, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan serta ketenangan dalam masyarakat.

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan perincian tugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-

---

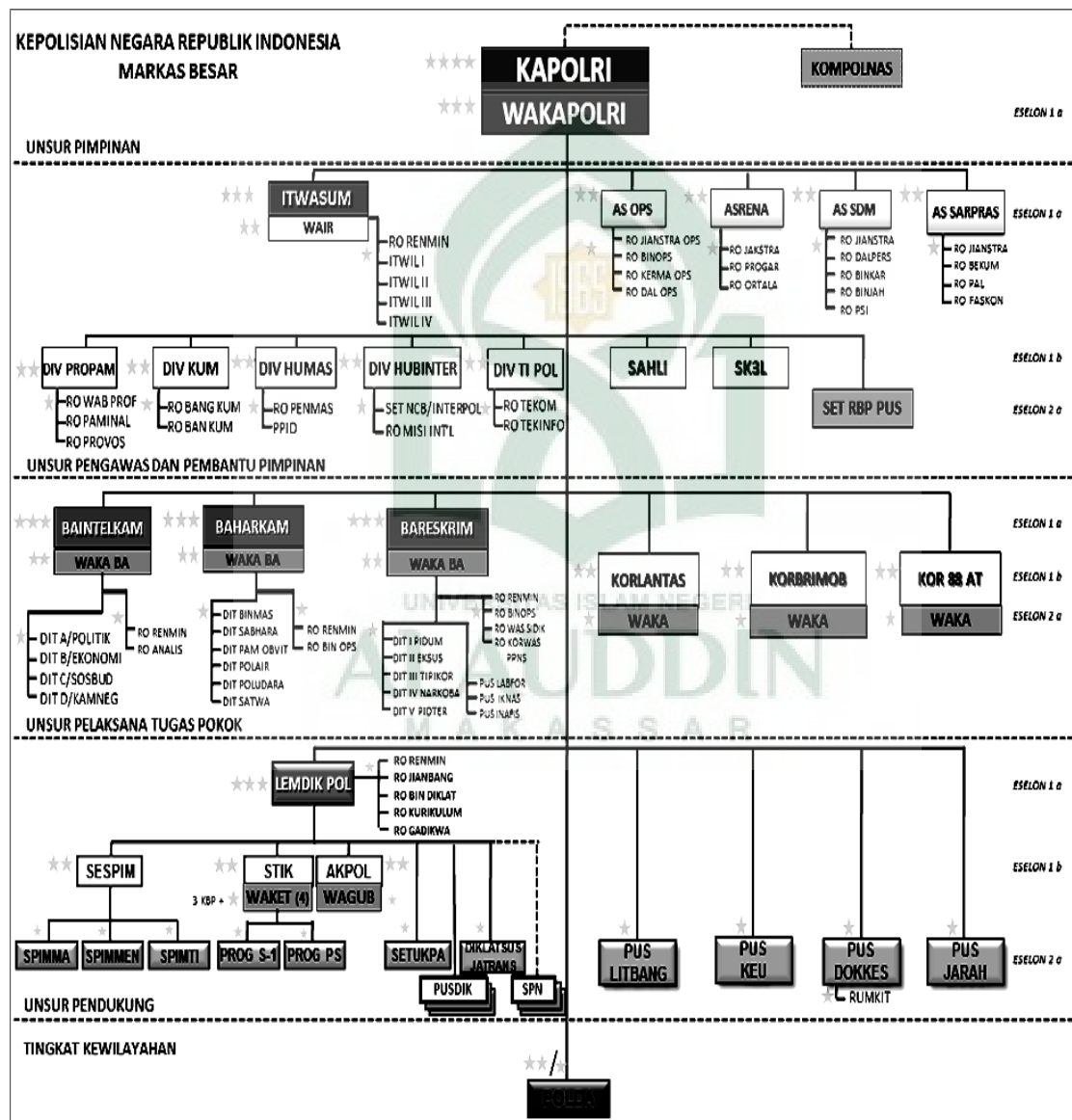
<sup>8</sup> Herry Iskandar, PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, (Makassar, 2009), h. 43.

<sup>9</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan:USU Press, 2009), h. 9.

pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

## 6. Struktur organisasi kepolisian.

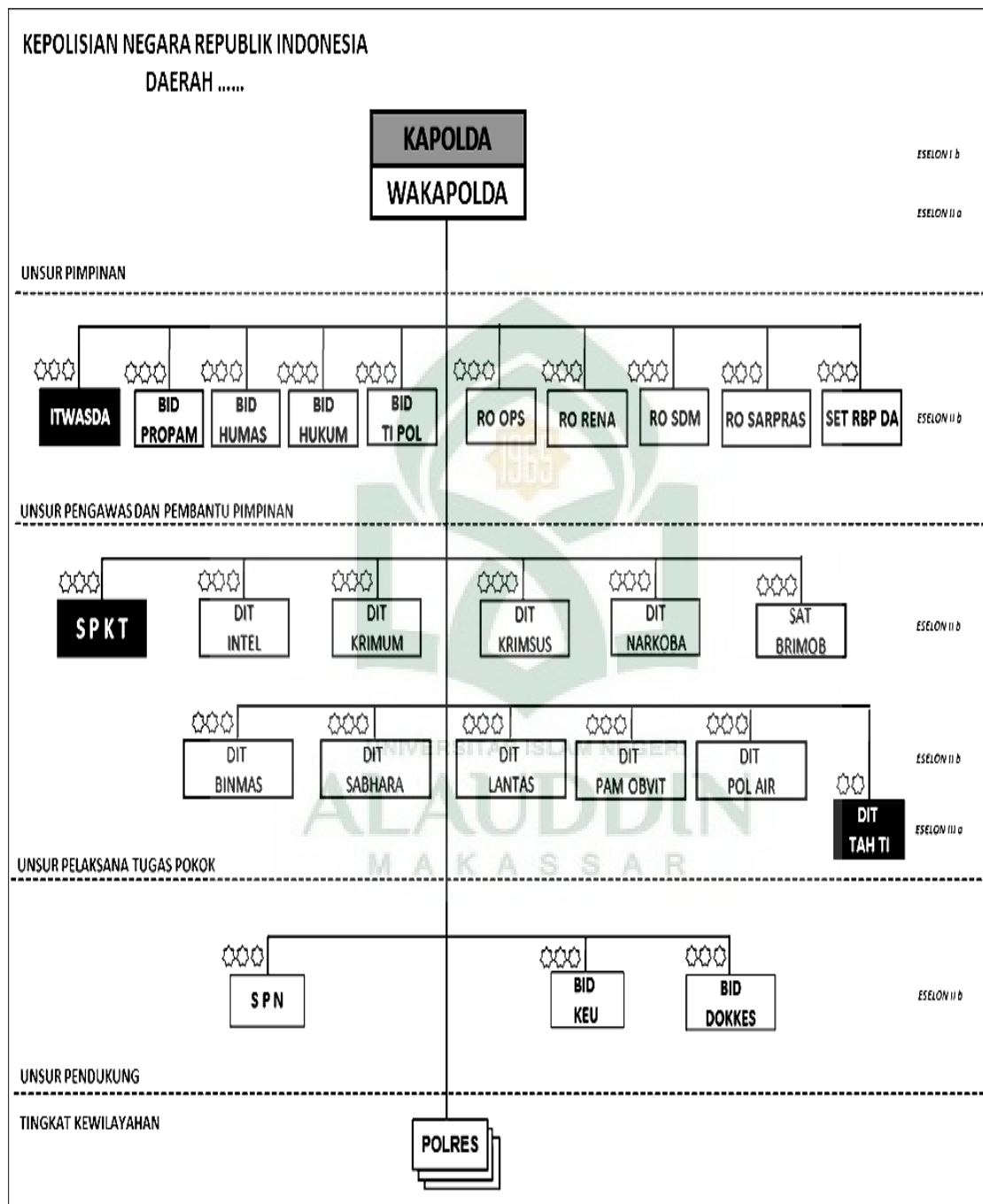
### a) Mabes Polri.



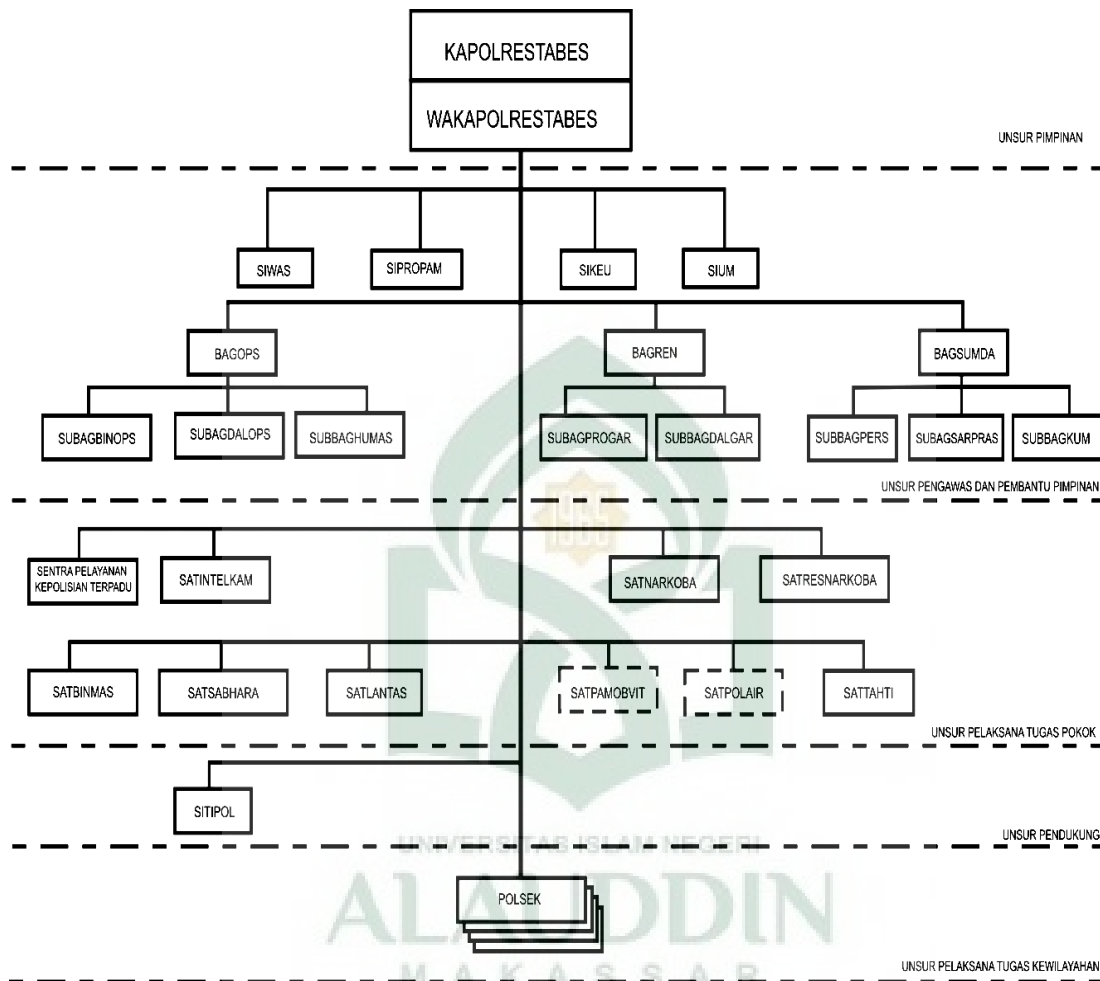
<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), h. 113



## b) Polda Sul-Selbar.



c) **Kapolrestabes Makassar.**



Sumber : <http://humas.polri.go.id/SitePages/Struktur%20Organisasi.aspx>

**B. Deskripsi pelaku tindak pidana narkoba anak dibawah umur**

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut

kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Pelaku tindak pidana narkoba di makassar menunjukkan peningkatan angka yang cukup signifikan salah satu dari pelaku / pengguna tidak hanya dewasa melainkan dari kalangan anak di bawah umur. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa:

**Tabel 1.1**

**Kasus Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2013**

No.	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Tersangka
1.	• 10-17 tahun:18 orang	• SD : 41 orang	• Pelajar : 05 orang	• Laki-laki: 234 orang • Perempuan: 21 orang
2.	• 18-20 tahun : 27 orang	• SLTP : 55 orang	• Mahasiswa :23 orang	
3.	• 21-25 tahun :63 orang	• SLTA : 152 orang	• Pegawai negeri : 10 orang	
4.	• 23-30 tahun :42 orang	• PT : 7 orang	• Pegawai swasta : 54 orang	
5.	• 31 tahun keatas :105 Orang		• Wiraswasta : 58 orang • Petani/nelayan : 2 orang • Buruh harian : 28 orang • Pengangguran : 57 orang	
Jumlah	255	255	255	255

**Tabel 1.2**

**Kasus Pelaku Tindak Pidana Narkotika 2014**

No.	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Tersangka
1.	• 10-17 tahun : 18 orang	• SD : 66 orang	• Pelajar : 13 orang	• Laki-laki: 269 orang • Perempuan: 39 orang
2.	• 18-20 tahun : 27 orang	• SLTP : 90 orang	• Mahasiswa :23 orang	
3.	• 21-25 tahun :63 orang	• SLTA : 147 orang	• Pegawai negeri : 03 orang	
4.	• 23-30 tahun :42 orang	• PT : 20 orang	• Pegawai swasta : 68 orang	
5.	• 31 keatas :105 Orang		• Wiraswasta : 67 orang • Petani/nelayan : 01 orang • Buruh harian : 63 orang • Pengangguran : 84 orang	
Jumlah	255	255	255	255

**Tabel 1.3**  
**Kasus Pelaku Tindak Pidana Narkotika 2015**

Data kasus narkotika 2015	jan	Feb	mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	ags	seb	okt	nov	des
Laki-laki	14	34	17	32	21	13	27	30	45	47	41	
Perempuan	1	2	1	2	2	*	3	6	3	10	8	
Anak-anak	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	2	

Barang bukti	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	jun	jul	ags	Seb	Okt	nov
Sabu	1043. 9643 Gram	471. 1447 Gram	52	40	1.041	19	90 kecil 2 sedang 104 kecil 4 plastik bekas pakai dan 0.104	5 paket sedang 104 kecil 4 plastik bekas pakai Dan 0.104 gram	44 kecil 54 + Gram 1 saset bekas pakai	11 paket kecil 12 paket sedang	68 kecil 8.05345 gram 2 sachet sisa sabu- sabu
Putaw	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ganja	*	*	4	7	38	6	*	*	2 1/2	1	1
Somad ril	*	*	*		*	*	*	*	10	1	1 besar 4 kecil

Dakwaan kasus kejadian bahwa terdakwa X, pada hari kamis 10 oktober 2015, sekitar pukul 19.25 wita berada di tempat kejadian di dekat rumah Y, di JL. Pannampu Makassar. Secara tanpa hak, memiliki menyimpan 1 sachet kecil sabu di bungkus dengan tempat rokok untuk menutupinya. Perbuatan

terdakwa telah diatur dan di ancam pidana dalam pasa 112 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.<sup>11</sup>

### **C. Dampak Yang Di Timbulkan Penyalahgunaan Narkotikaa Anak Di**

#### **Bawah Umur**

##### **1. Dampak Mengkomsumsi Narkotika**

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku merupakan delik formil.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :

- 1) *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkoba dalam dosis yang begitu banyak).
- 2) *Dellirium*, suatu keadaan dimana pemakai narkoba mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat

---

<sup>11</sup> AKP Ilham Fitriyadi. Kanit IDIK III, Wawancara di polrestabes makasassar pada tanggal 19 november 2015

menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakai dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*).

- 3) *Halusinasi*, adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat dan mendengar yang tidak pada kenyataannya.
- 4) *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau psycis/keduanya.
- 5) *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
- 6) *Coma*, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang pada akhirnya membawa pada kematian.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala sebagai berikut:

- 1) Heroin dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaannya biasanya disuntik ke dalam vena, disedot, atau dimakan. Bahaya dan akibat mengkonsumsi heroin dapat menimbulkan :
  - a) Tampak mengantuk.
  - b) Bicara cadel, apatis.
  - c) Jalan sempoyongan dan gerakan lamban.
  - d) Daya ingat dan perhatian terganggu.
  - e) Tubuh menjadi kurus, pucat, kurang gizi.

2) *Ecstasy* dalam farmakologi tergolong sebagai psikostimulansia (narkotika golongan II) seperti amfetamine, kefein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang. Bahaya dan akibat mengkonsumsi *ecstasy* dapat menimbulkan : <sup>12</sup>

- a) Denyut jantung dan nadi bertambah cepat.
- b) Gerak anggota badan tak terkendali (*tripping*).
- c) Kemampuan berempati meningkat.
- d) Keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat.
- e) Penglihatan kabur.
- f) Halusinasi.

3) Ganja merupakan jenis narkotika golongan I. Dampak mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan :

- a) Kedua mata merah, mulut kering.
- b) Banyak keringat, jantung berdebar.
- c) Kecemasan dan kecurigaan meningkat.
- d) Denyut jantung bertambah cepat.
- e) Nafsu makan bertambah.
- f) Euforia, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.<sup>13</sup>

## 2. Dampak fisik penyalagunaan narkotika:

- a. gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.

---

<sup>12</sup> AKP Ilham Fitriyadi. *Kanit IDIK III*, Wawancara di polrestabes makassar pada tanggal 19 november 2015

<sup>13</sup>Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* (Bandung: Armico, 1985), h. 25

- b. gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. gangguan pada kulit (pulmoner) seperti penahanan (abses), alergi, eksim
- d. gangguan paada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru meningkat, dan pengecilan paru-paru.
- e. sering, sakit kepala mula-mula dan muntah, murus-murus suhu tubuh meningkat, pencegahan hati dan sulit tidur.

### 3. Dampak psikis

- a. lamnban kerja, ceroboh bekerja, sering tegang dan gelisah
- b. hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. agitatif, cinta ganas dan perilaku brutal
- d. sulit berkonsentrasi, persaan terkesan dan tertekan
- e. cenderung menyendiri, persaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

### 4. Dampak social

- a. gangguan mental, anti social dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram<sup>14</sup>

## **D . penanganan pelaku narkotika anak di bawah umur menurut hukum islam dan implementasinya**

Agama Islam telah menjelaskan bahwa perbuatan meminum-minuman keras (khamr) adalah salah satu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.

---

<sup>14</sup> Bripka Wahyudin. Penyidik Unit I Wawancara di polrestabes makassar pada tanggal 19 november 2015



Termasuk di dalam golongan yang memabukkan ini ialah narkoba ( ganja, heroin, morfin, kokain dan sebagainya ). Pada masa Rasulullah SAW semua barang atau benda yang dapat mengakibatkan mabuk atau hilang ingatan dan merusak akal disebut dengan istilah khamr. Seperti yang telah di jelaskan dalam sebuah hadits, yang berbunyi:

Khamr merupakan istilah yang digunakan dalam Al Qur'an dan Hadis yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut. Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya. Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr adalah materi yang mengandung zat alkohol yang menjadikan penyalutnya mabuk.

Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr. Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.

## 1. Pandangan Islam Terhadap Narkotika

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.

Pengaturan hukum maupun sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika secara khusus dalam Islam belum ada. Karena, narkotika merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar hukum pengharaman narkotika adalah Al-Qur'an dan hadits Rasulluah saw. Yang berbunyi :

- a. Surah An-Nisaa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ ....

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....*

b. Surah Al-Maidah ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

c. Hadis Nabi Muhammad saw

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكرومفتّر

Artinya:

*Rasulluah saw melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)*

## 2. Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Dalam Islam

Meskipun benda atau zat padat ( narkotika ) tersebut belum terdapat pada masa Nabi, namun secara umum permasalahan narkotika telah disinggung dalam hukum Islam akan tetapi tidak diatur secara jelas dan rinci. Dalam permasalahan narkotika ini, penyusun akan mengkontekstkan

atau mengqiyaskan dalam masalah khamr, yang telah jelas hukumnya haram dalam agama Islam baik sedikit maupun banyak.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, tanpa paksaan dari orang lain wajib dijatuhi hukuman. Hukuman bagi peminum khamr adalah had, jika ia mukallaf. Hukuman had berarti deraan atau siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan dan harta bendanya. Dalam penerapannya hukuman had merupakan hukuman pokok.

Hukuman had hanya diberikan bila pelanggaran atas hak-hak masyarakat. Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan. Dalam hukum Islam, kata hudud dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah Nabi saw, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan qodhi atau penguasa yang disebut ta'zir.

Mengenai hukum yang berhubungan dengan hukuman delik khamr ini, dijelaskan bahwa barang siapa yang meminum khamr yaitu minuman keras yang terbuat dari bahan-bahan baik berupa zat cair atau padat dengan ketentuan dapat mengakibatkan mabuk selain khamr, maka peminum khamr

itu harus dihukum had, jika orang merdeka maka hukumannya 40 kali cambuk dan apabila peminumnya adalah budak (hamba sahaya) maka hukumannya adalah 20 kali cambuk. Boleh juga bagi hakim menambahkan hukuman menjadi 80 kali, hukuman tambahan ini sebagai hukuman yang bersifat mendidik supaya pelaku jera.

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) sanksi hukum berupa had bagi pemabuk berkaitan dengan khamr (narkotika) dilakukan dengan cara didera antara 40 sampai dengan 80 kali cambukan. Hukuman 40 kali cambuk ini diberikan kepada orang yang belum terbiasa mabuk agar mereka jera dan hukuman ini sebagai peringatan bagi mereka. Tetapi jika sudah terbiasa atau kecanduan boleh dicambuk sebanyak 80 kali

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Deskripsi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur.

Data pelaku tindak pidana narkotika mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tahun 2013 berjumlah 255 dengan anak di bawah umur sebanyak 41 orang, tahun 2014 sebanyak 323 dengan anak di bawah umur sebanyak 66 orang dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 341 orang.

2. Dampak yang di timbulkan penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur.

Secara umum dapat di timbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala seperti berhalusinasi, depresi mental, gangguan jiwa, coma, dan dapat menyebabkan melakukan kejahatan dan kekerasan. Adapun dampak fisikis penyalahgunaan narkotika pada sistem syaraf seperti jantung, otak, pembuluh darah, dan paru-paru.

3. Penanganan narkotika anak di bawah umur menurut hukum Islam

Di dalam hukum Islam seseorang dapat di hukum dengan hukuman mati setelah beberapa kali melakukan meminum *khamr* (sudah menjadi pecandu narkoba). Jika peminum/pecandu narkoba dapat di hukum dengan hukuman mati, apalagi pengedarnya. Hal ini disebabkan pengedar merupakan posisi kedua dalam rangkaian peredaran narkoba, setelah produsen (pembuat narkoba) kemudian

baru pemakai narkoba. Konsep pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba menurut Hukum Islam melalui program berbasis Agama Islam merupakan solusi yang paling tepat untuk dilakukan dalam kondisi apapun, karena agama menjadi faktor penting dalam membangun watak kepribadian dan kesalehan sehingga mewarnai langkah-langkah efektif dalam penanganan korban narkoba.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Pemerintah harus menggagalkan solusi UU narkoba yang baru, sehingga dapat meningkatkan eksistensi badan narkoba nasional dengan polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan. melalui penyuluhan narkoba sampai tingkat RW/RT mengenai bahaya narkoba dalam penaggulangan serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almansyur Fauzan dan Junaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Amriel, Reza Indragiri,. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba* .Jakarta: Salemba Humanika, 2008
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam/Editor*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Daniel S Lev, *Advolat Indonesia Mencari Legitimasi*. USAID: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Harkrisnowo, Harkristuti *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*. Jakarta :Komisi Hukum Nasional, 2002.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian*.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Poeliteia, 2000.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Sugiono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*.
- .
- .....*Panduan Menghindari Jerat Narkotika*. Cet. 1; Jakarta Buku Kompas, 2006.



<http://komunitasindependen.blogspot.com/2011/07/potretlembagapengadilan.html>.co  
m, diakses, Kamis 12 Februari 2015.

Suwono, *himpunan karya tentang hukum pidana*. Yogyakarta ; Liberty, 1982.

Lihat Pasal 3 tentang *Tentang Hak Anak* . PT. Angkasa Raya, Yogyakarta, 2006.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1986.

Prasetyo, J. T. *Kamus Hukum*. PT: Sinargrafika Jakarta, 2009.

Erwin, Rudy T. *Kamus Hukum*. PT :Sinargrafika Jakarta, 2009.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak*.

Soetodjo, Wagiati. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama: Bandung, 2008.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## RIWAYAT HIDUP



ANRIAS Lahir Di Panggentunga pada tanggal 4 Juni 1993. Anak kedua dari 3 bersaudara dan merupakan buah cinta dari pasangan Syamsuddin dan Hj. Santi Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD

Inpres panggentungan utara pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2005 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP PGRI Sungguminasa (Disamakan) dan tamat pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) Fakultas Syariah dan Hukum program strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.